

Hari/Tanggal : Senin/ 31 Juli 2023

Waktu : 10.00 WITA- Selesai

Tempat : Ruang Rapat Departemen Ilmu Sejarah,
Fakultas Ilmu Budaya

KOTA MAKASSAR DI MASA PEMERINTAHAN

WALIKOTA J. E. DAMBRINK (1918-1927)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Disusun Oleh:

DIAN PERMANA PUTRI

F81116308

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

Hari/Tanggal : Senin/ 31 Juli 2023

Waktu : 10.00 WITA- Selesai

**Tempat : Ruang Rapat Departemen Ilmu Sejarah,
Fakultas Ilmu Budaya**

KOTA MAKASSAR DI MASA PEMERINTAHAN

WALIKOTA J. E. DAMBRINK (1918-1927)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Disusun Oleh:

DIAN PERMANA PUTRI

F81116308

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

**KOTA MAKASSAR DI MASA PEMERINTAHAN
WALIKOTA J.E DAMBRINK (1918-1927)**

Disusun dan diajukan oleh:

DIAN PERMANA PUTRI

F81116308

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 28 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Konsultan I

Konsultan II



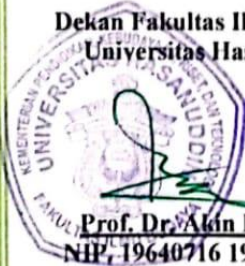
Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 197608272008011 011



Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S
NIP. 196412171998031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A
NIP. 19640716 199103 1 010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 197608272008011 011

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Jumat, 28 Juli 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**KOTA MAKASSAR DI MASA PEMERINTAHAN
WALIKOTA J.E DAMBRINK (1918-1927)**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Juli 2023



1. Dr. Ilham, S.S., M.Hum.

Ketua

2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

Sekretaris

3. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum

Penguji I

4. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum

Penguji II

5. Dr. Ilham, S.S., M.Hum.

Konsultan I

6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

Konsultan II

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : DIAN PERMANA PUTRI

NIM : F81116308

Jurusan/ Program Studi : ILMU SEJARAH

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“KOTA MAKASSAR DI MASA WALIKOTA J. E. DAMBRINK (1918-1927)”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau yang diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 Agustus 2023

buat pernyataan

DIAN PERMANA PUTRI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Kota Makassar Di Masa Walikota J. E. Dambrink (1918-1927)**” sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana dari Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini tentunya melalui proses yang cukup panjang hingga dapat sampai ke tangan pembaca saat ini. Skripsi ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik pihak yang secara langsung berperan dalam penyusunan skripsi ini maupun pihak yang berperan secara tidak langsung. Semua bantuan tersebut merupakan ilmu yang luar biasa bagi penulis. Sungguhlah ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang kiranya dapat memberi manfaat untuk orang lain. Semoga skripsi ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Skripsi ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yakni **Bapak Winarno** dan **Mama Amriani**, yang dengan sangat hebatnya dapat membawa anaknya ke perguruan tinggi hingga mendapatkan gelar sarjana. Penulis ingin berterima kasih sedalam-dalamnya atas segala doa, keringat, air mata, dan perjuangan Bapak dan Ibu. Terimakasih telah percaya dan sabar menunggu penulis hingga berada di titik ini. Tak lupa pula penulis panjatkan terima kasih yang

juga tak terhingga untuk kedua saudara penulis yakni **Awanda Erna** dan **Ryan Anugrah** atas segala dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pun penulis utarakan kepada:

1. Dosen Pembimbing penulis yakni **Dr. Ilham, S.S., M.Hum.** dan **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.** yang telah memberikan masukan dan ilmu yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian penulis. Terima kasih telah membuka wawasan penulis, terima kasih atas kesabarannya, dan terima kasih atas segala ilmunya selama masa perkuliahan penulis.
2. Almarhum **Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A.** selaku penasehat akademik penulis yang telah membimbing penulis selama hampir 4 tahun penulis menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah. Terima kasih telah menjadi penasehat akademik yang luar biasa bagi penulis. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik disisi-Nya. Amiin.
3. Seluruh dosen Departemen Ilmu Sejarah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan, mulai dari **Alm. Margriet Mokka Lappia, S.S., M.S., Dr. Bambang Sulistyono, M.S., Dr. H. Bahar Akkase Teng, Lep., M.Hum., Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., Dr. Nahdiah Nur, M.Hum., Dr. Muslimin AR Effendy, M.A., Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si., Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag., Nasihin**

M.A., A. Lili Evita, S.S., M.Hum., dan Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum.

4. **Uddjie Usman Pati, S.Sos.**, selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah, yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas selama masa perkuliahan penulis.
5. Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan jajarannya terkhusus kepada staf pegawai administrasi yang telah membantu segala jenis pengurusan berkas penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
6. Teman-teman seperjuangan Historian 2016, yang telah melalui berbagai macam kenangan manis dan pahit bersama sepanjang masa perkuliahan penulis. Ruang 212, 324 serta MKU 225 menjadi saksi bisu kita pernah tertawa dan gila bersama yang akan menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Teruslah menebar kebahagiaan dan sukses terus dimanapun kalian berada. Senang bisa mengenal dan salam sayang untuk kalian yakni **Hardewi, Sri Selvi Rahmayanti, Sinar Rahmania, Fitri Ramdayani, Evelyn Bongalimbung, Nur Asiska, Intan Rifana, Ega Maulana, Kiki Fatmila Akbar, Hartati, Intan Dwi Wahyuningtias, Benazer Mursyid Pono, Jusniati, Erni Syahrini, Khaerunnisa, Abd. Rahman Halim AD, Nasruddin, Rahmadi, Muh. Rais Palle, Hendra, Arisal, Erwin S, Burhanuddin, Muh. Arafah, Erwin Gutawa, Muh. Isman Idrus, Muh. Ammar Triyabyansyah,**

Zulkifli Triadi Putra, Andi Achmar Fadli, dan Nur Alam Mansyur.

Kebersamaan milik kita.

7. Terimakasih **Sinar, Dewi, dan Selvi** untuk hubungan yang terjalin selama ini, terimakasih atas warna-warni kehidupan dan kenangan baik maupun buruknya. Semua keluh kesah, tawa bahagia, tangis haru, pertengkaran, telah dilalui bersama. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan semangat yang membara dalam menggapai impian dan cita-cita. Ingat kalian itu berharga walau tak bisa diuangkan.
8. Komunitas Lingkar yang telah memberikan pengalaman dan ilmu mengenai kegiatan kesejarahan sehingga penulis banyak mendapat pengetahuan baru dan juga bertemu dengan orang-orang hebat. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan, kepada **kak Anto, kak Anna, kak Kahfi, Kak Teguh, Kak Alif, Kak Ruth** dan **Salsa**.
9. Untuk **Fitri Ramdayani** anaknya Om Mahmud, berkatmu penulis bisa lebih banyak mendapat sumber untuk penulisan skripsi ini, terimakasih banyak juga atas segala dukungan dan dorongan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini. Untuk **Arisal** terimakasih banyak atas segala masukan, bimbingan dan sumber yang sangat membantu penulis.
10. Untuk **Bangtan** yang telah mengajarkan penulis agar lebih bisa mencintai diri sendiri, menemani hari-hari penulis dengan mendengarkan lagu-lagu juga nontonin konten-konten yang ditimbulk Big Hit, terimakasih banyak. *Borahae*.

11. Ucapan terkhusus untuk diri sendiri, terimakasih banyak telah bertahan, terimakasih untuk terus hidup, dan terimakasih banyak untuk segalanya sehingga bisa sampai di saat ini.

Akhir kata, penulis sekali lagi menghaturkan terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga apa yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan ini dapat tersampaikan dan memberi manfaat bagi para pembacanya.

Makassar, 28 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Penelitian	5
1.4.2 Tujuan Penelitian	6
1.5 Metodologi Penelitian	6
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KOTA MAKASSAR DAN WALIKOTANYA.....	15
2.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	15

2.2 Johan Everwijn Dambrink.....	34
BAB III PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.....	41
3.1 Jalan.....	42
3.1.1 Drainase dan Selokan.....	47
3.1.2 Pembuangan.....	49
3.1.3 Pembangunan Rel Kereta Api.....	49
3.2 Jembatan.....	51
3.3 Pipa.....	53
BAB IV PEMBANGUNAN BANGUNAN UMUM.....	55
4.1 Bangunan Pemerintahan.....	59
4.1.1 <i>Gemeentehuis</i>	59
4.1.2 <i>Postcantoor</i>	61
4.2 Bangunan Pendidikan.....	62
4.2.1 <i>Kweekschool</i>	63
4.2.2 <i>Volkschool</i>	63
4.2.3 <i>Hollandsch Chineesche School</i>	64
4.2.4 OSVIA.....	64
4.2.5 <i>Hollandsch Indlansche School</i>	65
4.2.6 <i>Kweekschool voor Indlansche Schepelingen te Makassar</i>	66
4.2.7 <i>Frobes School I</i>	66
4.2.8 MULO.....	66
4.2.9 <i>Ambachtschool dan Landhouwschool</i>	67
4.3 Listrik.....	68

4.4 <i>Hamente Waterleiding</i>	69
4.5 Bangunan Kesehatan.....	70
4.6 Bangunan Perumahan.....	71
4.7 Bangunan Perdagangan.....	74
4.7.1 Pasar	74
4.7.2 Lembaga Keuangan.....	74
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Map Rotterdam and Environs, 17 th Century	20
Gambar 2.2 Peta Kampung Wajo dan Kampung Melayu.....	25
Gambar 2.3 Johan Everwijn Dambrink.....	34
Gambar 2.4 J. E. Dambrink Walikota dan Mr. Trip	39
Gambar 3.1 Peta Makassar.....	41
Gambar 3.2 Kereta Api Makassar-Takalar tahun 1922	51
Gambar 4.1 Peta Rinci <i>Fort Rotterdam</i> Abad ke-17.....	56
Gambar 4.2 Peta Kota Makassar awal abad ke-19.....	58
Gambar 4.3 Gedung Balai Kota (<i>Gemeentehuis</i>).....	60
Gambar 4.4 <i>Post- en telegraafkantor te Makassar</i>	62
Gambar 4.5 OSVIA.....	65
Gambar 4.6 <i>Waterleiding</i> Makassar	70
Gambar 4.7 <i>Javasche Bank</i>	76
Gambar 4.8 Foto Pegawai Kantor DJB Agentschap Makassar tahun 1925	78
Gambar 4.9 Logo <i>Algemeene Volkscredit Bank</i>	80

DAFTAR ISTILAH

Afdeeling	Bagian wilayah pemerintahan di bawah Gubernur dan dipimpin oleh Asisten Residen
Distrik	Bagian wilayah administrasi di bawah onderafdeling
Onderafdeling	Bagian wilayah administratif yang diperintah oleh seorang kontrolir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda
Residen	Penguasa penjajahan tertinggi sekaligus mewakili Gubernur Jenderal di Hindia Belanda di wilayah kekuasaannya
Asisten Residen	Pegawai negeri tertinggi di suatu afdeling pada masa penjajahan Belanda
Decentralisatiewet 1903	Undang-Undang Dasar untuk membentuk daerah-daerah otonom
Decentralisatie Besluit 1905	Aturan yang mengemukakan tentang pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang Dewan dalam pengelolaan keuangan yang dipisahkan dari pemerintah pusat

Gemeente	Pemerintah Kota yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kota secara otonom
Gemeenteraad	Dewan Kota Makassar yang merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola kotanya sendiri yang ketuanya dipimpin oleh Walikota
Burgemeester	Walikota
Gemeentehuis	Gedung Balai Kota
Retribusi	Pemungutan uang
Passer Verponding	Peraturan Pasar
Regent	Penguasa setempat
Kweekschool	Sekolah pendidikan guru bagi pribumi yang dibangun pada tahun 1876
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)	Sekolah menengah lanjutan bagi lulusan HIS yang dibangun tahun 1927
Ambachtschool	Sekolah yang bertujuan untuk mendidik para tukang yang dibangun pada tahun 1927

Opleiden School voor Indlansche Ambtenaren	Sekolah yang dibangun untuk calon-calon pegawai negeri pribumi yang didirikan pada tahun 1910
Frobes School	Sekolah taman kanak-kanak khusus untuk orang Eropa yang dibangun pada tahun 1920
Kweekschool voor Indlansche Schepelingen te Makassar	Sekolah Pelayaran untuk pribumi yang dibangun tahun 1915
Hollandsch Indlansche School	Sekolah yang dibangun pada tahun 1914 untuk anak-anak golongan bangsawan dan pegawai-pegawai negeri
Volkschool	Sekolah Desa yang dibangun pada tahun 1907
Hollandsch Chineesche School	Sekolah khusus orang Cina yang dibangun pada tahun 1908
Garden City	Konsep bangunan yang dikelilingi oleh halaman baik depan, samping maupun belakang
Bouw en Woonverordening van de Gemeente Makassar	Aturan yang mengatur segala tata cara membangun, tata bangunan dan pekarangan, aturan bagi penghuni dan pemakai, serta soal kebersihan. Peraturan ini mendorong penataan

	perkotaan secara komprehensif dan berkesinambungan
Staatstramwegen op Celebes	Wakil urusan perkerataapian di Sulawesi
Stopplaats	Tempat pemberhentian kereta/tram, sekarang disebut halte atau stasiun kecil
Wilhelminakade	Jembatan pelabuhan
Haven Werken	Meningkatkan sarana pelabuhan.
Burgerlijke Openbare Werken	Dinas Pekerjaan Umum pada masa kolonial Hindia Belanda
Koningsplein	Sekarang dikenal sebagai lapangan Karebosi
Waterstraat	Pekerjaan yang bidang utamanya sarana perhubungan dan komunikasi khususnya jalan, saluran air, penerangan dan penyiraman jalan
Hoa Kiauw Gin Hang	Bank Cina yang berdiri pertama kali di Makassar pada tahun 1914
Standard Chartered Bank	Bank swasta Eropa yang bertujuan untuk melayani kebutuhan perbankan perusahaan-perusahaan perdagangan

Wilhelmina Cade	Jembatan Pelabuhan
Volkshuisvesting	Perumahan Rakyat
Waterleiding	Perusahaan air bersih
Militaire Hospital	Rumah sakit yang dibangun pada tahun 1917, kini menjadi Rumah Sakit Pelamonia
Rathkamp	Apotik yang dibangun pada tahun 1920, kini menjadi apotik Kimia Farma
Krankzinnig Gesticht	Rumah Sakit Jiwa yang dibangun pada tahun 1920, kini menjadi Rumah Sakit Dadi
Tijdelijk Hoofdinspecteur	Kepala Inspektor Sementara
Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen	Pelayanan Bea Masuk/ Bea Keluar dan Cukai
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid	Departemen Pengajaran, Industri dan Ibadah
Hoofdcommies	Kepala Komite
Algemeene Secretarie	Sekretariat Negara
Stadsgemeente	Pemerintah Kotapraja

Districthoofd	Kepala distrik
Regeringsreglement	Semacam Undang-Undang Dasar bagi daerah jajahan Belanda
Staatsblad	Lembaran Negara
Nieuwe Organisatie 1824	Aturan tata pemerintahan baru di wilayah Makassar yang mengatur aspek administratif maupun peradilan
Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden	Pemerintahan Sulawesi dan Wilayah Taklukannya
Kapitan	Disebut juga Matoa untuk orang Wajo adalah pangkat administratif yang membawahi kampung kota seperti Kampung Melayu dan Kampung Wajo dan orang Cina.
Celebes	Nama pulau Sulawesi yang dipakai saat masa Kolonial
Budget	Anggaran

ABSTRAK

Dian Permana Putri (F81116308), dengan judul “Kota Makassar Di Masa Pemerintahan Walikota J. E. Dambrink (1918-1927)”, dibimbing oleh Dr. Ilham, S.S., M.Hum dan Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang berfokus pada sejarah kota yang membahas tentang Kota Makassar yang mendapat status *Gemeente* dan peranan Walikota pada tahun 1918-1927 terhadap pembangunan dan penataan perkotaan. Metode yang digunakan untuk menjabarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah dengan tahapan pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan dan penataan kota di Makassar terus mengalami perkembangan yang signifikan. Dimulai dari pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas kota seperti jalan-jalan, jembatan, saluran air, perumahan rakyat, pembangunan gedung pemerintahan, waterleiding, listrik, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lembaga keuangan. Ditetapkannya beberapa peraturan yang khusus mengatur tentang penataan kota sehingga penataan di Kota Makassar menjadi komprehensif dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Kota Makassar, *Gemeente*, Walikota

ABSTRACT

Dian Permana Putri (F81116308), with the title "Makassar City under Mayor J. E. Dambrink (1918-1927)", supervised by Dr. Ilham, S.S., M.Hum and Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

This research is about city history that discusses Makassar City which received *Gemeente* status and the role of its Mayor in 1918-1927 towards urban development and arrangement. The method used to describe the problems in this research is the historical method with the stages of source collection, verification, interpretation or interpretation, and historiography.

The results showed that the development and arrangement of the city in Makassar continued to experience significant developments. Starting from the construction and improvement of city facilities such as roads, bridges, waterways, public housing, construction of government buildings, waterleiding, electricity, hospitals, schools, markets, and financial institutions. The establishment of several regulations specifically regulating urban planning so that the arrangement in Makassar City becomes comprehensive and sustainable.

Keywords: Makassar City, Gemeente, Mayor

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam studi sejarah perkotaan, kota hanya didefinisikan sebagai suatu lokasi dalam proses kajian dan penulisan sejarah. Jika dalam kota terdiri dari penduduk kota, warga kota dan aktivitas kota, maka dengan memerhatikan luasnya bidang garapan tersebut mestinya akan beragam tema dan pendekatan yang lahir dalam melihat dan menulis tentang sejarah kota.¹ Kota merupakan perwujudan kompleksitas berbagai bidang; sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan, yang terus bergerak dan juga merespon perubahan zaman yang bergerak menuju sebuah identitas baru, meninggalkan identitas lamanya secara terus menerus.² Wilayah perkotaan di Nusantara memiliki banyak aspek yang dapat diteliti oleh sejarawan terlepas dari kota mana dan bagaimana kota tersebut lahir.

Pada periode pemerintahan Hindia Belanda terjadi beberapa kali perubahan struktur pemerintahan. Perubahan ini diiringi dengan perubahan kebijakan penataan kota. Abad ke-19 dapat dianggap sebagai abad lahirnya kota kolonial, meskipun beberapa kota telah berkembang pada periode sebelumnya. Di Sulawesi sendiri pada tahun 1824 dibentuk *Gouvernement van Celebes Onderhoorigeden*

¹Dias Pradadimara, "Penduduk Kota, Warga Kota, Sejarah Kota: Kisah Makassar", *Dalam Kota lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota Di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. pp 252-72. (Yogyakarta: Ombak, 2005); Ilham Daeng Makkelo. "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis". (Jurnal Lensa Budaya. Vol. 12 No. 2. 2017), hlm. 84.

²Ilham Daeng Makkelo. "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis". Jurnal Lensa Budaya. (Vol. 12 No. 2. 2017), hlm. 97.

(Pemerintahan Sulawesi dan Wilayah Taklukannya) dan Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan berstatus *distrik* berdasarkan *Staatblad* 1824 No.31a.³ Tahun 1870 *distrik* Makassar berubah statusnya menjadi *Afdeling* Makassar. Selanjutnya berdasarkan *Decentralisatiewet* tahun 1903 mengenai tata tertib terhadap hukum dasar Hindia Belanda untuk Provinsi atau bagian-bagiannya, dan dana dari *budget* pemerintah bisa dipisahkan untuk keperluan-keperluan khusus daerah itu.⁴ Maka di tahun 1905 Makassar menjadi bagian dari 32 kota di Hindia Belanda yang mendapat status sebagai *Gemeente* serta kewenangan untuk mengelola kotanya sendiri.⁵

Gemeente merupakan sebutan oleh Kolonial Belanda yang berarti Kotamadya. Pada masing-masing kota berstatus *Gemeente*, dibentuk *Gemeenteraad* (Dewan Kota) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola kotanya sendiri. Kepala Kotamadya disebut *Burgemeester* (Walikota) yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal; dia adalah Presiden Dewan Kota dan Presiden Komisi Eksekutif yang dipilih dari Dewan, yang disebut Komisi Walikota dan Komisi Anggota Dewan Kotamadya.⁶

³ Daud Limbagau. *Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar abad 19-20*. Dalam Mukhlis *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin, 1989), hlm. 22.

⁴ Stroomborg. *Hindia Belanda 1930*. (Yogyakarta: Ifada, 2018), hlm. 110.

⁵ Irawan Soejito. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 75.

⁶ Stroomborg, *Op.Cit*, hlm. 115.

Kota Makassar merupakan kota baru yang kemudian tumbuh dan meluas bersamaan dengan semakin lengkapnya perangkat birokrasi pemerintahan yang mengatur, mendisiplinkan dan menguasai kota. Makassar kemudian berkembang menjadi daerah otonom dengan nama *Gemeente van Makassar* pada tahun 1906 dan dibentuklah *Gemeenteraad van Makassar* (Dewan Kota Makassar) yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri.

Perubahan status kota Makassar menjadi *Gemeente* dan dibentuknya *Gemeenteraad* sebagai perangkat pemerintahan yang sumber pendapatan berasal dari berbagai jenis pajak, seperti pajak kendaraan, pendapatan, upah dan lain-lain serta keuntungan dari perusahaan-perusahaan pemerintah seperti pasar, perumahan, tanah, air minum dan sebagainya yang dipergunakan untuk membangun Kota Makassar dalam berbagai bidang. Pada awal dibentuknya *Gemeenteraad*, pemerintah Hindia Belanda juga membangun sebuah gedung sebagai pelengkap dari pemerintahan lokal yang baru dibentuk oleh Hindia Belanda, yaitu *Gemeentehuis* (Balai Kota) yang dibangun pada tahun 1918 sebagai kantor pusat pemerintahan *Gemeenteraad* di bawah pemerintahan *Burgemeester* pertama, Johan Everwijn Dambrink (1918-1927) yang ikut serta mengukuhkan status kota Makassar menjadi sebuah kotamadya pada saat itu.⁷

J. E. Dambrink inilah yang meletakkan dasar perkembangan kota, yang mana kota Makassar pada abad ke-20 menjadi kota baru yang tumbuh dan

⁷ Syahrudin Mansyur. "Konstruksi Baru Pameran Museum Kota Makassar". (Tesis: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 113.

berkembang, dilihat dari perekonomian di kota maupun di sekitar kota.⁸ Momentum penting yang menjadi dasar perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur terjadi tahun 1918 ketika ditetapkan aturan “*Bouw en Woonverordening van de Gemeente Makassar*” yang mengatur segala tata cara membangun, tata bangunan dan pekarangan, aturan bagi penghuni dan pemakai, serta soal kebersihan. Peraturan ini mendorong penataan perkotaan secara komprehensif dan berkesinambungan.⁹ Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pemerintahan Walikota J. E. Dambrink tahun 1918-1927.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam penguraian jawaban dari masalah yang dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memberikan batasan uraian yang akan disajikan oleh penulis yakni, temporal dan spasial.

Batasan temporal dalam penulisan karya tulis ini adalah periode tahun 1918-1927; 1918 dipilih sebagai awal tahun penelitian oleh peneliti karena pada tahun tersebut J. E. Dambrink ditunjuk sebagai Walikota pertama di Kota Makassar.¹⁰

⁸ Ilham Daeng Makkelo. Makalah Seminar Nasional Sejarah. 2017. “Merayakan Teknologi: Infrastruktur Dan Tata Kota Makassar, 1900-1942”, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ Yudhistira Sukatanya. Dari Makassar Ke Makassar, dalam *Makassar Doeloe, Makassar Kini, Makassar Nanti*. (Makassar: Yayasan Losari Makassar, 2000), hlm. 66.

Tahun 1927 dipilih sebagai tahun terakhir penelitian karena merupakan tahun berakhirnya masa pemerintahan J. E. Dambrink.

Dalam batasan spasial atau tempat yang dikaji dalam penelitian ini ialah pada wilayah kota Makassar yang berstatus sebagai Komadya (*Gemeente*) sekaligus sebagai pusat Pemerintahan Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pembangunan infrastruktur perkotaan berupa sarana perhubungan darat di bawah pemerintahan Walikota J. E. Dambrink di Kota Makassar tahun 1918-1927?
2. Bagaimana pembangunan bangunan umum di Kota Makassar pada masa pemerintahan Walikota J.E. Dambrink tahun 1918-1927?

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur berupa sarana perhubungan di bawah pemerintahan Walikota J. E. Dambrink di Kota Makassar tahun 1918-1927.
- b. Menjelaskan pembangunan bangunan umum berupa gedung di Kota Makassar pada masa pemerintahan Walikota J. E. Dambrink tahun 1918-1927.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang kota Makassar pada masa pemerintahan Walikota J. E. Dambrink dari tahun 1918-1927.
- b. Sebagai referensi dan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya serta untuk memberi kontribusi pada perkembangan penelitian ilmu sejarah.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode adalah petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Metodologi adalah ilmu yang membicarakan jalan dan jenis penulisan sejarah sebagai pertanggungjawaban masa silam dan konstruksi masa silam sebagai sejarah dalam arti objektif menunjukkan satu *universum simbolis* yang berfungsi dalam masyarakat untuk mengobjektifkasikan dan melegitimasi eksistensi dalam masyarakat. Pada cirinya sejarah bersifat unik dan tidak akan berulang kembali untuk mendapatkan gambaran pada sebuah peristiwa sejarah yang dikisahkan, dapat dilacak dengan mempergunakan bahan-bahan dokumen.¹¹

Setiap penelitian harus menggunakan metode penelitian yang hendak digunakan. Secara umum, ada empat tahapan dalam melakukan sebuah penelitian sejarah, yakni; pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan penulisan sejarah. Namun, mengacu pada pendapat salah seorang sejarawan Indonesia, Kuntowijoyo, maka suatu penelitian sejarah hendaknya diawali dengan

¹¹ Sartono Kartodirjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. (Gramedia: Jakarta, 1982). hlm. 96.

adanya pemilihan topik.¹² Oleh karena itu, maka penulis sekaligus peneliti memutuskan untuk memulai metode penelitiannya dengan diawali dari pemilihan topik.

Pemilihan topik didasarkan pada ketertarikan penulis tentang walikota pertama Makassar yaitu J. E. Dambrink sebagai orang yang mengawali penataan perkotaan pertama di awal abad XX. Dalam merekonstruksi dan mengisahkan tentang Kota Makassar di masa J. E. Dambrink, maka langkah awal yang penulis lakukan adalah *survey* (terjun langsung kelapangan) untuk pengumpulan data berupa data sumber primer dan sekunder. Pada tahap ini dikumpulkan sumber utama dari kantor Arsip, baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta maupun dokumen dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber primer yang digunakan penulis adalah sumber kolonial yaitu Arsip *Notulen Van Het Verhandele In De Vergadering Van De Raad Gemeente Makassar* dan Arsip Pemerintahan Kotamadya Ujungpandang tahun 1926-1988. Dari surat kabar seperti *De Locomotief* yang dapat diakses melalui *Delpher*. Sedangkan sumber sekunder, penulis mengadakan pengumpulan kepustakaan dengan cara mempergunakan buku-buku, skripsi, artikel, makalah, dan jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan dengan judul penulis. Sumber ini dapat diakses dari Perpustakaan Kota Makassar, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin serta situs-situs jurnal lain seperti

¹² Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). hlm. 67.

Jurnal Lensa Budaya, Jurnal Citra Laika, dan situs lain yang memuat jurnal yang relevan dengan penelitian.

Untuk mencapai penulisan yang objektif, maka data yang terkumpul terlebih dahulu diuji otentitas dan validitasnya, dalam hal ini melakukan kritik sumber baik kritik eksteren maupun interen. Pada tahapan ini, sumber-sumber relevan yang telah diperoleh akan diverifikasi kembali untuk mengetahui keabsahannya¹³. Kritik sumber seringkali digunakan untuk memverifikasi kebenaran serta keakuratan sumber primer. Hal ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu kritik eksternal, yang menyangkut masalah autentisitas sumber dan tahapan, serta kritik internal, yang terkait tentang masalah kredibilitas sumber yang digunakan.

Setelah data lolos seleksi barulah kemudian disusun fakta-fakta historis sehingga dapat dicapai tingkat objektivitas yang lebih tinggi. Berbagai fakta atau data sejarah yang ada kemudian disusun secara kronologis lalu ditafsirkan sehingga ditemukan struktur kalimat yang logis. Dalam tahap ini, penulis akan memadukan hasil penafsiran yang akan diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang telah didapatkan, baik melalui sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Dari proses analisis inilah, diperoleh fakta-fakta sejarah. Kemudian fakta-fakta yang telah diperoleh lalu disintesis sehingga mendapat sebuah kesimpulan.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

Penulisan sejarah merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi, lalu disusun dalam bentuk penulisan sejarah secara kronologis. Hasil akhir dari proses ini berbentuk skripsi yang kemudian dapat dilihat dan dipelajari oleh para pembaca, terutama dari yang berlatar belakang kesejarahan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Guna memperoleh sumber pustaka dalam penelitian ini, maka penulis selaku peneliti akan menggunakan beberapa sumber sejarah sebagai bahan literatur yang sesuai dengan topik pembahasan serta penunjang penulisan hasil penelitian. Karena itu, penulis menggunakan beberapa sumber primer, buku dan artikel ilmiah sebagai sumber penulisan.

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai pendukung dan pembanding serta bahan analisa untuk menambah wawasan penulis mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Kerangka teori yang dijadikan landasan berfikir bermanfaat untuk mempertajam konsep serta untuk menghindari terjadinya pengulangan. Adapun beberapa sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

Mengenai pemahaman penulisan tentang Hindia Belanda dari sistem pemerintahan, administrasi, hukum dan layanan publik, penulis menggunakan buku karya Dr. J. Stroomberg berjudul *Handbook of Netherlands East-Indies 1930* yang telah diterjemahkan menjadi *Hindia Belanda 1930*¹⁵, yang membantu penulis

¹⁵ Stroomberg. *Hindia Belanda 1930*. (Yogyakarta: Ifada, 2018).

dalam memaparkan hal yang terkait dengan Hindia Belanda di tahun-tahun sekitar 1930 atau terkait tahun-tahun sebelumnya. Serta buku berjudul *Hindia Belanda, Studi Tentang Ekonomi Majemuk* karya J. S. Furnival yang banyak bercerita mengenai Hindia Belanda yang dimulai pada tahun 1600-1929¹⁶ yang pada bab IX, menjelaskan masalah pemerintahan Hindia Belanda hingga masalah pemerintahan-pemerintahan lokal yang ada dibawah pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam memahami pemerintah kota di masa kolonial penulis menggunakan buku berjudul *Pengantar Sejarah Kota* yang ditulis oleh Purnawan Basundoro yang menjelaskan mengenai awal mula lahirnya pemerintah kota di Indonesia, dimulai dari pemerintah pada masa Kolonial hingga pemerintahan pada masa Jepang.¹⁷ Dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur kota hingga dibentuknya Dewan Kota bagi kota-kota besar di Indonesia yang kemudian memiliki peran penting terhadap pembangunan kota baik di Jawa maupun di luar Jawa. Tidak hanya itu, pada buku ini menjelaskan mengenai sistem administrasi *Gemeente* (Kotamadya) mulai dari kepala pemerintahannya, gambaran mengenai anggota-anggotanya, kewenangan hingga kewajiban *Gemeente*.

Buku yang ditulis oleh Edward L. Poelinggomang yang berjudul *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar tahun 1906-1942*, digunakan penulis untuk membantu penjelasan tentang bagaimana politik kekuasaan yang ada di

¹⁶ J. S. Furnivall. *Hindia Belanda, Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. (Jakarta: Freedom Institute, 2009).

¹⁷ Purnawan Basundoro. *Pengantar Sejarah Kota*. (Yogyakarta: Ombak, 2012).

Makassar tahun 1906-1942¹⁸, serta buku yang berjudul *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia* yang disusun oleh Freek Colombijn dkk yang merupakan buku kumpulan tulisan mengenai sejarah kota-kota besar di Indonesia. Salah satu tulisan yang dimuat yaitu “*Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar*” yang ditulis oleh Dias Pradadimara yang membahas terbentuknya ruang kota hingga sejarah birokrasi pemerintahan kota Makassar di masa pemerintahan kolonial hingga pasca kemerdekaan¹⁹. Semua buku ini penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan Makassar dalam tahun penelitian penulis karna memberikan penulis informasi mengenai perkembangan perkotaan di Indonesia khususnya Makassar pada masa kolonial hingga masa kemerdekaan Indonesia.

Sebuah makalah yang berjudul *Merayakan Teknologi: Infrastruktur dan Tata Kota Makassar 1900-1942*²⁰ yang ditulis oleh Ilham Daeng Makkelo yang menjelaskan tentang sarana dan infrastruktur perkotaan di Makassar hingga tahun 1930an dan menjelaskan bagaimana penataan fasilitas yang ada di Makassar saat itu dari jalanan hingga ke bangunannya sehingga dapat membantu penulis untuk

¹⁸Edward L. Poelinggomang. *Perubahan Politik Dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. (Yogyakarta: Ombak, 2004).

¹⁹ Dias Pradadimara. *Penduduk Kota, Warga Kota, Sejarah Kota: Kisah Makassar, Dalam Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Kemerdekaan*. Pp 252-72. (Yogyakarta: Ombak, 2005).

²⁰ Ilham Daeng Makkelo. *Merayakan Teknologi: Infrastruktur Dan Tata Kota Makassar 1900-1942*. (2017).

memberi gambaran mengenai penataan perkotaan, pembangunan dan suasana di kota Makassar.

Sebuah skripsi yang ditulis oleh Nur Jannah Jamal berjudul *Perumahan Rakyat Kota Makassar*²¹ yang menjelaskan mengenai pembangunan rumah rakyat di Makassar yang mana dalam penelitian penulis, hal ini menjadi salah satu pencapaian yang dilakukan J. E. Dambrink dalam pembangunan kota sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian penulis. Dan juga skripsi berjudul *Dewan Kota Makassar (Gementeraad van Makassar)* yang ditulis oleh Puspita Mita²². Menjelaskan mengenai kota Makassar yang masih berstatus *Gemeente* dari tahun 1918-1938 yang menjadi tolak ukur penulis, namun disini penulis hanya fokus kepada masa pemerintahan J. E. Dambrink di tahun 1918-1927 sebagai walikota pertama.

Untuk metode penulisan skripsi sejarah ini penulis menggunakan buku *Penjelasan Sejarah* dari Kuntowijoyo²³, serta buku *Pengantar Ilmu Sejarah* karya Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid²⁴, yang sangat membantu dalam sistematika penulisan dan penelitian sejarah yang dilakukan penulis.

Semua tinjauan pustaka yang digunakan banyak memiliki kesamaan dengan yang ditulis penulis karena menulis dan membahas mengenai Kota, Hindia Belanda

²¹ Nur Jannah Jamal. "Perumahan Rakyat Kota Makassar". (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2015).

²² Puspita Mita. "Dewan Kota Makassar (*Gementeraad van Makassar*)". (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2017).

²³ Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

²⁴ Abdul Rahman Hamid dan Muhammad Saleh. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2011).

dan juga Makassar yang memberikan banyak informasi kepada penulis. Namun belum ada yang fokus dan membahas secara detail Hindia Belanda saat Walikota J. E. Dambrink menjabat di Kota Makassar pada tahun 1918-1927. Inilah yang menjadi pembeda diantara semua tulisan yang ada di tinjauan pustaka yang mana fokus penelitian ini pada peran walikota pertama Makassar di masa pemerintahannya, dalam penataan dan pembangunan infrastruktur serta bangunan-bangunannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang berjudul “Kota Makassar di Masa Pemerintahan Walikota J. E. Dambrink (1918-1927)” akan disusun dalam lima bab pembahasan. Gambaran mengenai isi dari hasil penelitian tersebut dituliskan berdasarkan sistematika penulisan.

BAB I Pendahuluan menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari penelitian ini. Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau kajian historiografi yang relevan, dan sistematika pembahasan. Adapun sistematika dalam bab I ini dibuat menyesuaikan dengan pedoman penulisan dan pelaksanaan tugas akhir skripsi yang dibuat oleh Tim Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

BAB II akan memaparkan mengenai keadaan kota Makassar, bagaimana kota Makassar mendapat status menjadi *Gemeente* yang kemudian memperoleh walikotanya yang akan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menata kota , dan menjelaskan tentang Walikota J. E. Dambrink.

BAB III membahas mengenai pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan sarana perhubungan darat yang ada di Kota Makassar dimasa walikota J. E. Dambrink tahun 1918-1927.

BAB IV menjelaskan mengenai pembangunan umum berupa gedung di Kota Makassar pada masa pemerintahan walikota J. E. Dambrink tahun 1918-1927 dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

BAB V kesimpulan ini memberikan kesimpulan dari penjabaran pada bab-bab sebelumnya. Dalam kesimpulan ini akan diberikan pula simpulan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB II

KOTA MAKASSAR DAN WALIKOTANYA

2.1 Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar mulai muncul sebagai ibukota kerajaan yang tumbuh menjadi kawasan bandar niaga setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dalam tahun 1511. Bermula dari menyatunya Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, ekspansi besar-besaran terus dilakukan untuk memperkuat kedudukan dan hegemoni Kerajaan Makassar. Hingga tiga dekade awal abad ke-16, belum ada pusat perdagangan di Sulawesi yang pernah memainkan peran dalam percaturan internasional. Sampai pada awal abad ke-17 Makassar menjadi titik komersial sebagai basis bagi semua pihak yang sedang mencari jalan untuk menghindari usaha VOC memonopoli perdagangan rempah di Maluku.²⁵

Kedudukan Makassar akhirnya diambil alih oleh Kongsi Dagang VOC pasca pecahnya Perang Makassar sekitar tahun 1666-1667. Perang tersebut terjadi karena keinginan besar dari VOC untuk mengambil alih kekuasaan Kerajaan Makassar yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin demi memonopoli perdagangan rempah. Hal tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan Perjanjian Bungaya setelah dimenangkannya perang oleh VOC, yang pada dasarnya sangat menguntungkan bagi pihak VOC serta mematikan peranan Kerajaan Makassar. Kemudian, VOC yang pada saat itu dipimpin oleh Speelman

²⁵ Anthony Reid. 2009. *Pluralisme dan Kemajuan Makassar Abad ke-17*, dalam Roger Tol, (Eds.) *Usaha dan Kuasa di Masyarakat Sulawesi Selatan* terj. Innaniwa. Jakarta: KITLV-Jakarta. hlm 75.

menghapuskan peran kerajaan sebagai pengawas bandar niaga -sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian- dan memperkecil wilayah kerajaan hingga tidak memiliki batas perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai Pelabuhan yang kemudian dikembangkan oleh VOC dengan aturannya dan menjadikannya transit untuk pelayaran rempah-rempah dari Maluku. Makassar lantas dijadikan pos pengawasan bagi pelayaran ke bagian timur.²⁶

Kota Makassar baik di bawah Gowa-Tallo' atau VOC memiliki kesamaan dalam kegunaannya, geografinya, dan strukturnya. Kesamaan-kesamaan dalam susunan benteng, permukiman, dan pelabuhan mencerminkan berlanjutnya perdagangan dan pertahanan dalam perkembangan kota, meskipun terdapat perubahan sosial dan politik yang luar biasa dimana orang Eropa menggantikan orang Makassar sebagai kelompok yang dominan. Benteng Ujung Pandang milik Gowa-Tallo terletak di atas tanah kering yang padat dekat dengan pantai. Di sebelah utara dan selatannya terdapat lahan yang sesuai untuk perumahan meski sebagian dataran alluvial di sebelah timurnya berawa-rawa yang tetap berupa sawah, ladang garam, ataupun empang ikan hingga abad ke-20 ketika daerah ini dimasukkan sebagai wilayah kota.²⁷

²⁶ Edward L. Poelinggomang. *Makassar Abad XIX : Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2016). hlm 30-3.

²⁷ Heather Sutherland. "Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Makassar Perdagangan dan Kota di Abad ke 18", Dalam Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan. (Yogyakarta: Ombak), hlm. 21.

Setelah Belanda berhasil menang dari peperangan melawan kerajaan Gowa-Tallo dan memindahkan pusat kekuasaan ke *Fort Rotterdam* maka lambat laun sekitaran benteng yang dinamakan *Vlaardingen* menjadi ramai oleh sekutu-sekutu Belanda yang terdiri dari sekian banyak suku-suku bangsa. *Fort Rotterdam* menjadi pusat kekuasaan dan *Vlaardingen* menjadi pusat niaga menggantikan peranan yang pernah dilakukan oleh Sumba Opu. Akan tetapi nama Makassar tetap dipergunakan sebagai bandar dan kota yang pernah dikuasai oleh Belanda²⁸. Pada periode ini, tak banyak bangunan yang didirikan oleh Belanda, hal ini disebabkan karena diawal pemerintahannya Belanda masih menghadapi erangan-serangan dari kerajaan Gowa-Tallo. Kecuali *Fort Rotterdam* yang dirombak pada tahun 1673, tidak banyak bangunan berarti yang didirikan. Menurut Yulianto Sumalyo (1991) pada masa ini terdapat empat elemen yang membentuk wilayah kota Makassar yaitu *Fort Rotterdam*, *Negory Vlardingien*, Kampong Melayu dan terakhir Maradekaya.²⁹

Benteng Rotterdam dimaksudkan untuk melindungi permukiman baru *Vlaardingen* yang dengan cepat berkembang di bagian utara Benteng. Daerah sebelah kanan jalan, disebelah timur *Fort Rotterdam* muncul kampung dan kebun.³⁰ Daerah di antara *Vlaardingen* dengan Ujung Tanah di sebelah utara dengan cepat

²⁸ Mattulada. “Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700)”. (Makassar: Hasanuddin University Press, 1991), hlm. 97

²⁹ Ningrum Pangestu. “Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan Monumen Di Kota Makassar (1930-1945)”. (Skripsi: Universitas Hasanuddin. 2015), hlm. 28.

³⁰ Heather Sutherland. “Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Makassar Perdagangan dan Kota di Abad ke 18”, Dalam Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan. (Yogyakarta: Ombak), hlm. 21-22.

menjadi tempat berbagai kampung, dan permukiman juga berkumpul di sebelah selatan benteng. Geografi etnis di Makassar di akhir abad ke-17 dan ke-18 merupakan hasil dari tarik menarik antara usaha VOC untuk memaksa setiap orang dalam kotak etnisnya. Peraturan untuk menjaga permukiman homogen secara etnis terus diulang sepanjang abad ke-18.

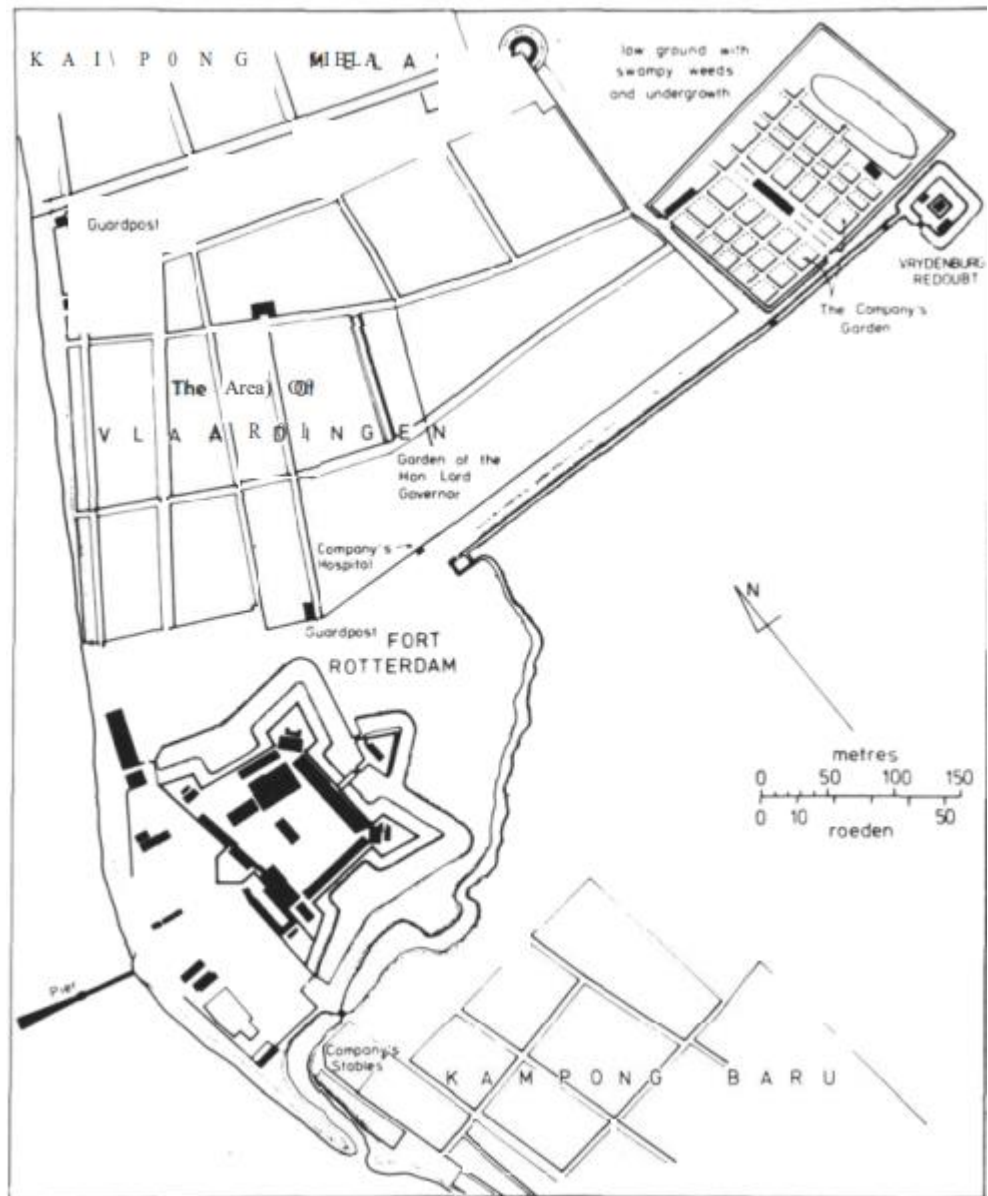
Kelompok-kelompok masyarakat seperti orang Melayu dan Cina yang dianggap menguntungkan secara komersial dan tidak terkait dengan penguasa-penguasa lokal yang dirasa tidak menjadi ancaman, diizinkan tinggal lebih dekat ke Benteng. Meskipun demikian sulit untuk menerapkan pemisahan antar kelompok di dalam kota yang pada waktu itu sangat kecil. Perjanjian antar VOC dan Aru Palakka membolehkan dibentuknya dua pasar: Pasar Belanda yang berada diantara benteng dan *Vlaardingen*, dan pasar di Kampung Bugis. Pasar Belanda ternyata sebagian besar berisi orang Asia, dengan banyak budak berjualan pada penduduk setempat, di Kampung Melayu banyak orang non-Melayu, dan Kampung Butung adalah permukiman dari banyak Cina Muslim.

Gambaran mengenai kota Makassar pada periode awal adalah sebuah peta yang disebut "*Fort Rotterdam and Environs 17th Century*" yang berada dalam buku klasik Leonard Y. Andaya tentang Aru Palakka. Namun terdapat kekeliruan dalam peta tersebut yakni penulisan tahun. Peta tersebut dibuat oleh Mayor Reimer seorang anggota seni militer, untuk sebuah komite penyidikan atas pertahanan VOC yang dikirim dari Belanda pada tahun 1790. Kesan yang diberikan peta tersebut adalah jalan yang rapi dan tembok bagus, sangat tidak realistis karena gambaran

tembok yang ditunjukkan dalam peta baru dibangun 1788.³¹ Sementara keadaan sebenarnya pada periode awal ialah Kota Makassar belum memiliki tembok yang memisahkan wilayah, justru yang ada ialah wilayah benteng *Rotterdam* yang menjadi pusat pemerintahan dan Kawasan vital perdagangan berada di *Vlaardingen*.

Kawasan *Vlaardingen* yang terletak disebelah utara benteng *Rotterdam* diperluas dan dibangun beberapa jalan dimana orang-orang Eropa, mestizo Eropa-Asia, Cina, Mardijkers (bekas budak yang Kristen dan keluarganya), Moor (India Muslim) dan orang-orang pribumi tinggal. Meskipun Sebagian besar tantara Belanda dan para pejabat tinggal di dalam benteng tetapi ada juga diantara mereka yang tinggal di *Vlaardingen*. *Vlaardingen* secara tradisional dapat dikatakan sebagai pusat perniagaan wilayah “perkotaan” Makassar yang dikuasai Belanda.

³¹ *Ibid.*, hlm. 25.



Gambar 2.1 Map Rotterdam and Environs, 17th Century.³²

Kemudian setelah jumlah penduduk bertambah di kota ini, kawasan kota hanya dapat dipeluas ke timur, di bagian selatan terdapat benteng lain dan lapangan militer di sekitar benteng, sebelah barat adalah laut dan di utara benteng terdapat

³² Sumber: <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbnm4wp.26>

Vlaardingen yang relatif padat hingga wilayah Ujung Tanah. *Vlaardingen* dilindungi oleh *paggers* (tembok) dari batang kelapa dan bambu yang pertama kali didirikan tahun 1675 dan selalu diperbaharui secara teratur sesudahnya. Ketika kota berkembang ke timur benteng kumpulan rumah dari bambu mulai muncul di luar tembok (*paggers*) dan ketika pemukiman bertambah padat, *paggers* baru mulai didirikan untuk melindunginya akan tetapi rumah-rumah baru muncul lagi di sebelah timur tembok, hal ini terus terjadi berulang-ulang. Setelah Perang Makassar berakhir, Speelman menata Makassar menjadi tiga bagian: pusat pemerintahan di *Fort Rotterdam*, pusat perdagangan di *Negory Vlaardingen*, dan pemukiman penduduk (kampung). *Fort Rotterdam* memiliki tembok-tembok batu yang besar, kubu-kubu, dan pintu gerbang. *Vlaardingen* dielilingi oleh stokade yang lebih sederhana, dan dibelakangnya terdapat kampung. Pejabat pegawai pemerintah, dan tentara umumnya bermukim dalam benteng dan wilayah sekitarnya, sementara pedagang Eropa dan Cina tinggal di pusat perdagangan. Di kampung bermukim petani, nelayan, pedagang, dan pelaut Bumiputra (Melayu, Bugis, dan Makassar)³³.

Pada 1677 para bangsawan Kerajaan Gowa diijinkan membangun permukiman di selatan Fort Rotterdam oleh VOC, yang dikenal dengan Kampung Beru. Kampung ini kemudian menjadi tempat tinggal kelompok mestizo (peranakan), Bumiputra yang beragama Kristen, dan golongan merdeka (budak yang telah dimerdekakan). Mereka umumnya bekerja sebagai abdi pemerintah, baik sebagai pengawal rendahan maupun anggota militer. Di wilayah ini, dalam

³³ Edward L. Poelinggomang. "Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim". (Jakarta: KPG. 2002), hlm. 173.

perkembangannya, dibangun kantor pemerintah, pengadilan, tangsi militer, rumah sakit, dan permukiman pegawai. Oleh karena itu pemekaran kota selalu ke arah timur dan selatan *Fort Rotterdam*. Ketika Makassar ditata, para saudagar Melayu, Bugis, dan Makassar ditempatkan di Kampung Melayu, sebelah utara pusat niaga. Sementara itu penduduk Wajo yang mengungsi ke Makassar diberi tempat di sebelah timur *Vlaardingen*, yang dikenal dengan sebutan Kampung Wajo. Orang Cina, karena jumlah mereka semakin banyak dan tidak ada lagi lahan di *Vlaardingen*, diizinkan membangun permukiman di bagian utara Kampung Wajo, yang disebut Kampung Cina. Penataan tersebut menyebabkan tanah pemerintah di sekitar *Vlaardingen*.

Dari awal pemukiman di tahun 1660an, pusat *Vlaardingen* adalah *Chineststraat* (nantinya menjadi *Tempelstraat* dan kemudian menjadi Jalan Sulawesi) paralel dengan garis pantai. Hampir semua orang Cina dan cukup banyak orang Eropa tinggal disini. Di sebelahnya adalah *Tuinstraat* (Jalan Kebun) yang utamanya dihuni orang Eropa yang juga tinggal dekat Pasar Belanda diantara benteng dan *Vlaardingen* di sepanjang jalan ke Bontoala. Kampung-kampung termasuk kampung Melayu, Kampung Wajo, dan permukiman Bugis tidak dianggap sebagai bagian dari “Negory”. Penduduk *Vlaardingen* awalnya tumbuh dengan cepat tetapi kemudian tetap kecil dan stabil sampai sekitar pertengahan abad ke-19.

Di pertengahan abad ke-18, *Chineststraat* merupakan jalan yang paling penting, baik untuk permukiman maupun untuk perdagangan. Di jalan ini terdapat sekitar 70 rumah yang mana 60% dimiliki orang Cina, dan 35% dimiliki orang

Eropa. Diantara “pagar baru” (disebelah timur *Vlaardingen*, mungkin di Jalan Jampea), dan kebun dan lapangan VOC (timur laut benteng) kumpulan rumah-rumah bambu menaungi penduduk campuran antar mestizo, orang Eropa yang lebih miskin dari umumnya, Mrdijkers, dan orang Indonesia. Rumah-rumah bambu ini, 49 buah di tahun 1734, di kemudian hari menjadi “Nieuwe Negory” atau “Nieuwe Vlaardingen”. Mereka menduduki suatu daerah yang masih sebagian besar kebun dan tetap berada di “di luar pagar”, mungkin hingga tembok batu bata baru selesai dibangun di tahun 1788. Tembok baru ini berada di sepanjang Jalan Timor di sebelah selatan dan Jalan Irian di sebelah timur. Jalan Timor pertama dikenal oleh Belanda di abad ke-19 sebagai *Buitenmuurstraat* karena ada di luar tembok.

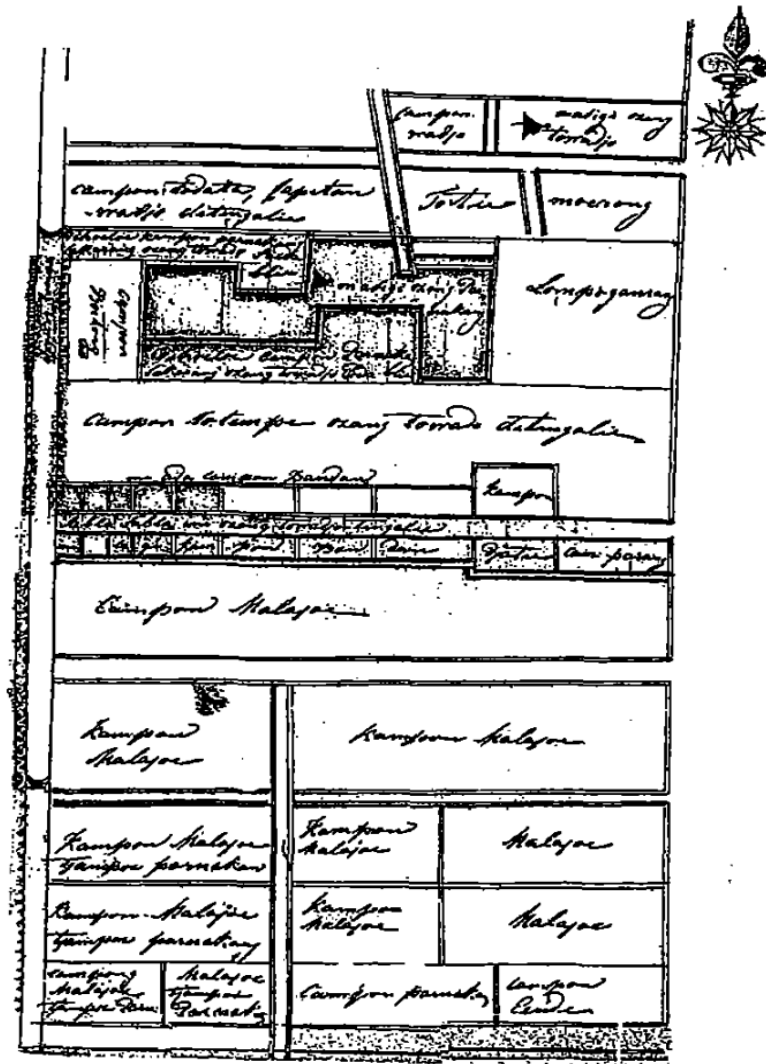
Kondisi di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 inilah yang ditunjukkan dalam peta Reimer yang dicetak ulang dalam buku Andaya. Batas-batas kota yang sesungguhnya di abad ke-17 dan ke-18 jauh lebih kecil: batas utara di Jalan Sumba (*Grootestraat*), dan batas timur di Jalan Jampea (*Burgerwachtstraat*). Daerah di sebelah utara, diantar Jalan Timor dan Jalan Sumba dimaksudkan untuk tetap terbuka dengan pertimbangan kemiliteran, tapi rumah-rumah terus saja bertumbuh di sepanjang Jalan Bali (*Zandestraat*) yang berada di luar pagar sampai tahun 1788. Jalan-jalan yang digambarkan pada peta Reimer nampak begitu rapi, pada kenyataannya tidak terlalu rapi yang mana terdiri dari jalan setapak dengan sebagian besar rumah-rumah bambu dan pekarangan yang berisi gudang dan tempat kerja.³⁴

Sepanjang periode kolonial Belanda dari abad ke-17 hingga abad ke-20, satu pembedaan dilakukan antara daerah inti dan daerah pinggir *Fort Rotterdam*

³⁴ *Op.cit.*, hlm. 30.

adalah inti, dibatasi oleh daerah-daerah yang dianggap sebagian besar dihuni oleh orang-orang Eropa (termasuk mestizo), seperti *Vlaardingen*, tetangga di sebelah timurnya *Nieuw Negorij*, dan permukiman yang muncul dekat sisi selatan benteng, Kampung Baru. Inti Belanda ini pada kenyataannya campuran termasuk sebagian besar orang Cina, tetapi juga banyak budak dari seluruh Indonesia yang membentuk lebih dan separuh penduduk. Di sebelah utara *Vlaardingen* adalah Kampung Melayu dan Kampung Wajo, di bawah kendali tak langsung VOC, dan dianggap sebagai bagian dari kota. Dari sudut pandang VOC, orang-orang Bugis dan Makassar yang diperintah oleh penguasa dan kepala kelompok masing-masing berada di luar kota, tetapi dalam kenyataannya kampung mereka yang berada di utara dan selatan benteng, secara sosial dan ekonomi berintegrasi ke dalam Makassar.

Kesan atas situasi di daerah kampung yang lebih urban dapat kita peroleh dengan memperhatikan satu peta daerah-daerah kampung Wajo dan Kampung Melayu, di utara *Vlaardingen* di awal abad ke-19.



Gambar 2.2 Peta Kampung Wajo dan Kampung Melayu, Makassar c.1818. Bisa dilihat masjid-masjid Wajo, Peranakan, dan Melayu.³⁵

Gambaran yang diperlihatkan pada peta awal abad ke-19, di sebelah utara adalah daerah orang Wajo, dengan masjid Wajo dan rumah Kapitannya³⁶. Orang-

³⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁶ Kapitan atau disebut juga Matoa untuk orang Wajo adalah pangkat administratif yang membawahi kampung kota seperti Kampung Melayu dan Kampung Wajo dan orang Cina.

orang Wajo telah memperluas daerahnya ke Selatan dengan membeli rumah-rumah dari orang Cina muslim yang tinggal di sekitar masjid Cina. Di sebelah barat masjid Cina adalah Kampung Butung, dengan warung Wajo tersebar di sepanjang pantai yang merupakan daerah lama orang Cina yang mana hingga abad ke-18 penduduk sebenarnya adalah peranakan³⁷ dan orang Melayu. Di sebelah timur masjid Cina adalah kumpulan rumah yang luas milik Lompoanrang (orang Bugis). Kemudian di sebelah selatannya ada konsentrasi orang Wajo, di Kampung Totempe, Kampung Bandan, Kampung Jati, dan Kampung Parang, sampai mencapai Kampung Melayu. Di peta ini juga terdapat Mesjid Melayu³⁸, rumah-rumah orang Melayu di sebelah barat yang dihuni orang Melayu dan peranakan, dan jauh disebelah tenggara ada Kampung Ende.

Tahun 1824 dapat dikatakan sebagai tahun yang sibuk karena serangkaian peristiwa penting dan menentukan arah perkembangan sejarah Hindia Belanda pada umumnya dan sejarah Sulawesi Selatan pada khususnya. Pada tanggal 17 Juli 1824 Gubernur Jenderal mengeluarkan satu aturan tata pemerintahan baru di wilayah Makassar yang mengatur aspek administratif maupun peradilan atau *Nieuwe Organisatie* 1824³⁹ yang diterbitkan dalam *Staatsblad* 1824 nomor 31a. Dimana wilayah Makassar yang dimaksud dalam aturan ini adalah dari titik utara yang

³⁷ Hingga abad ke-19 peranakan berarti muslim dan sebagian besar Cina Makassar adalah muslim.

³⁸ Dibangun oleh Kapitan Abdul Kadir dan saudara dari Syahbandar dan pedagang kaya Ince Ali Asdullah di tahun 1756 (1117 H).

³⁹ Dias Pradadimara. "Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19". *Lensa Budaya* Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 58.

sekarang menjadi kota Palu (sebelumnya disebut teluk Palos) sampai Pulau Selayar dan Pulau Sumbawa di Selatan dan Pulau Buton di Timur.

Di tahun 1848 Makassar dimasukkan ke *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden* (Pemerintahan Sulawesi dan Wilayah Taklukannya) yang secara eksplisit menunjukkan wilayah yang diklaim pemerintah Hindia Belanda meski pada prakteknya tidak mengubah wilayah yang dikelolanya. Dengan pengaturan ini, secara lebih rinci lagi pembagian wilayah dibagi menjadi tiga kategori yaitu:⁴⁰

- 1) Wilayah langsung di bawah kekuasaan Hindia Belanda (*Gouvernement Landen*).
- 2) Wilayah yang tidak secara langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda (*Leenroerge Landen*) atau disebut juga daerah pinjaman. Dimaksud wilayah yang tidak diperintah secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda tetapi telah ditundukan oleh militer pemerintah Kolonial Hindia Belanda disebut juga sebagai “daerah tundukan”. Wilayah ini disebut juga sebagai “daerah pinjaman” karena wilayah yang termasuk kedalamnya telah dianggap sebagai wilayah kekuasaan Hindia Belanda tetapi “dipinjamkan” atau “diserahkan kembali” kepada penguasa tradisional setempat. Wilayah yang dimaksud akan diserahkan kembali kepada penguasa tradisional yang telah

⁴⁰ Daud Limbagau, “Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20”, Dalam Mukhlis: Persepsi Sejarah Kawasan Pantai (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin), hlm. 20.

mengesahkan kontrak yang Menyatakan bahwa mereka akan mewakili pemerintah kolonial berkuasa diwilayahnya sendiri.

- 3) Kerajaan merdeka yang hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda didasarkan pada perjanjian Bongaya yang diperbarui tahun 1824 atau daerah-daerah Sekutu (*Bondgenootschappelijke Landen*). Kepada daerah ini pemerintah kolonial hanya menuntut kedaulatan atas pemerintahnya di Sulawesi bagian selatan.

Wilayah yang termasuk dalam kategori pertama adalah Distrik Makassar meliputi kota Makassar sendiri, dan pulau-pulau kecil yang terletak di Selat Makassar atau di sebelah Selatan kota Makassar yaitu:⁴¹ pulau-pulau Spermode (Kalarowang ri Lau, Kalarowang i Raya, Ba“tangan), Sakulawa, Bana-Banawang, Salemo, Sagara, Sabanka, Tello Lempo, Samatello Tengnga, Samatello Cadi, Rea Roang, Salebo, Towa Raja, Denna Camba, Labuwa, Uwasang, Gusung, Anru Reijang, jangang-janganga, Bone-Boneyang, Batu Luwar, Lantang Gege, Pingo, Korita, Samrangang Sama Tellu ri Lau, Sama Tellu i Raya, Sama Tellu Finge, Saputi Sabuton, Banko-Bankoan, Saugie, Satando, Cambe, Cambaang Kulambeng, Palla, Laiya, Lompo Utang, Karawrang Cadi, Karawarang Lompo, Serappo Lompo, Serappo keke, Podang Lompo, Pankaiya, Kankadiya, Balang Lompo, Balang Cadi, Mouang, Gunting, So Soa, Sanane, Panangbuangang, Pajenekang, Bungeng Data, Badi, Bone Tambung, Bone Battang, Barang Lompo, Barang Cadi, Kodingareng

⁴¹ *Lijst der Landen en Filanden tot Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden*. (Arsip Nasional RI khusus arsip Makassar No. 362/4). Via Daud Limbagau, “Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20”, Dalam Mukhlis: Persepsi Sejarah Kawasan Pantai (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin).

Lompo, Samaloku, Lai-lai, Gusung Bone, Sorante, Pamangangang, Pandangangang, Kapoposang, Lomo hingga Kondo Bali; Distrik Utara (Noorderdistricten) yang meliputi wilayah Maros, Mandalle, Bontoa, Tangkuru, Tallaju, Tanralili, Turikale, Simbang, Ri Lau^o, Ri Timboro^o, Ri Raya, Sudiang, Malawa, Camba, Caneba, Balocci, Laiya, Labuaja, Bungoro, Pangkajene, Bengo, Labbakkang/Labakkang, Ma^orang, Kalukua, Sigeri/Sejeri, Tallo, Payang, Kalebone/Kaba, dan Kate^one; Distrik Bantaeng dan Bulukumba (Bonthain en Boeloecoemba) meliputi Distrik Bantaeng/Bonthain dan Tompobulu, Gantarang, Tala^o, Ujung Loe, Palewoi, Bontotangnga, Garassi, Hero, Lange-Lange Tiro, Ara, Tana Beru, Lemo-Lemo dan Bira; Distrik bagian selatan (Zuider Districten) yang meliputi beberapa distrik seperti Distrik Aeng Towa, Bontolebang, Glisson (Galesong), Polongbangkeng, Sawakong, Manuju, Ballo, Lengkesse, Takalar, Tope Jawa, dan Lakatong; Distrik-distrik bagian Timur (Ooster Districten) serta Distrik Selayar yang meliputi Distrik Bonto Bangun, Tanete, Batang Mata, Bukit, Mare^o-Mare^o, Bonea, Opa-Opa, Gantarang, Balla Bulu, Laiyolo, bonto Barusu^o, Barang-Barang, Puta Bangunn dan Onto.

Wilayah yang termasuk kategori kedua ialah Kajeli, Pare-Pare, Ternate, Tello, Wajo, dan Laiwoei. Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kategori ketiga ialah Mandar, Toraja, Massengrempulu, Luwu, Ajatapparang, Bajokeke, Batu Putie, Labaso, Barru, Soppeng, Bone, Gowa, Sanrobone, Toratea, Buton, Sumbawa dan Flores.

Dengan terbentuknya *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden* maka ditunjuklah Makassar sebagai pusat pemerintahan untuk wilayah Sulawesi

dan daerah taklukannya. *Gouvernement van Makassar* tetap dipimpin oleh seorang Gubernur, dan setiap distrik dikelola oleh seorang *magistraat* (Untuk Distrik Makassar) dan *resident* untuk distrik lainnya yang didampingi oleh para regent (penguasa setempat) dan dibantu oleh kepala kepala distrik (*districthoofd*) gallarang dan jannang (Makassar) atau galla dan janna (Bugis).

Penataan berikutnya adalah distrik Makassar sudah terdapat beberapa kampung di dalamnya yakni *Vlaardingen*, *Prins Henrik Pad* dan Kampung Baru meskipun sebenarnya kampung-kampung tersebut sudah ada. Tahun 1860 distrik Makassar di perluas daerahnya dengan memasukan beberapa kampung kedalamnya yakni, Kampung Wajo, Ende, Bissie, Sambung Jawa, Ujung Tanah, Kampung Melayu, Gusung, Gilisong, dan Mariso⁴².

Pada pertengahan abad ke-18 *Chineststraat* merupakan jalan yang paling penting, baik untuk permukiman maupun untuk perdagangan. Di jalan ini terdapat sekitar 70 rumah, 60% milik orang Cina dan 35% milik orang Eropa. Sebelum tahun 1850 pusat perdagangan adalah deretan toko dan gudang yang terbentang dari utara ke selatan, yang dipisahkan oleh dua jalan yakni *Pasarstraat* (sekarang jalan Nusantara) dan *Chinastraat*.⁴³

Naturalis asal Inggris, Alfred Russel Wallace, menjejakkan kakinya di Makassar antara September-November 1856. Makassar dalam gambaran Wallace,

⁴² *Op.cit.*, hlm. 22.

⁴³Edward L Poelinggomang, "Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim". (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 147.

Makassar adalah kota tercantik yang dibangun pemerintah Belanda di Bagian Timur Nusantara: rumah-rumah penduduk Eropa, Tionghoa dan pribumi ditata dengan elok, jalan-jalan disiram setiap sore hampir tidak ada debu, sampah-sampah dikelola dengan baik, pipa-pipa bawah tanah membawa semua kotoran dan mengalirkan ke saluran penampungan terbuka, air kotor akan masuk ke penampungan saat arus pasang dan hanyut saat surut.⁴⁴

Pada awalnya daerah-daerah dibawah pemerintahan Belanda dibagi menjadi dua sistem yang berbeda yaitu politis dan administratif. Secara politis, ada wilayah pemerintah dibawah pemerintahan langsung dan untuk wilayah-wilayah pribumi berada dibawah pemerintahan tidak langsung. Di wilayah pertama rakyat secara langsung tunduk terhadap aturan pemerintah Belanda, sedangkan untuk wilayah kedua rakyat tunduk terhadap penguasa pribumi yang mengakui kekuasaan Belanda. Sistem administratif untuk wilayah diluar Jawa dibagi-bagi kedalam *afdelingen* dibawah pengawasan asisten residen yang merupakan orang Eropa.⁴⁵

Makin lama makin banyak wewenang-wewenang pusat yang diserahkan kepada pejabat-pejabat daerah dengan petunjuk-petunjuk pusat. Hal ini merupakan langkah nyata kearah Desentralisasi dan peningkatan peran pribumi dalam pemerintahan dengan dibentuknya Dewan Kota. Maksud Desentralisasi ini tidak lebih dari suatu sarana untuk mencapai penyelenggaraan kepentingan-kepentingan

⁴⁴Wallace dalam *The Malay of Archipelago*, Via Eko Rusdianto. Historian.id.

⁴⁵ J. S. Furnival. "Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk". (Jakarta: Freedom Idtitute. 2009), hlm. 273-275.

setempat dengan cara yang tepat tergantung bagaimana situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Situasi dan kondisi yang berbeda-beda ini tentu saja lebih diketahui oleh pemerintah daerah dibanding pusat. Pada intinya Desentralisasi bertujuan untuk membuka kemungkinan diadakannya pemerintahan sendiri untuk daerah-daerah dengan membuat percobaan kecil tetapi sekaligus memberikan kelonggaran terhadap pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri.⁴⁶

Pada periode pemerintahan Hindia Belanda terjadi beberapa kali perubahan struktur pemerintahan, perubahan ini diiringi dengan perubahan kebijakan penataan kota. Penataan wilayah kota di Sulawesi Selatan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kota di Pulau Jawa. Tahun 1824 setelah dibentuk *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigeden* (Pemerintahan Sulawesi dan Wilayah Taklukannya) dan Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan berstatus distrik, berdasarkan *Staatblad* 1824 No. 31a.⁴⁷ Tahun 1870 distrik Makassar berubah statusnya menjadi *afdeling* Makassar. Selanjutnya tahun 1903, diadakanlah perubahan terhadap pasal 68 *Regeringsreglement* 1854 (semacam Undang-Undang Dasar bagi daerah jajahan Belanda) dengan penambahan pasal 68a, 68b, dan 68c yang memberikan kesempatan untuk membentuk daerah-daerah otonom. Usulan tersebut disusul dengan diundangkannya *Wet Houdende Decentralisatie van het*

⁴⁶ Irawan Soejito. "Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia jilid I". (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita. 1984), hlm. 76-81.

⁴⁷ Daud Limbagau, "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20", Dalam Mukhlis: Persepsi Sejarah Kawasan Pantai (Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin), hlm. 22.

Bestuur in Nederlandsche Indie atau yang lebih dikenal dengan nama *Decentralisatie Wet 1903*.⁴⁸

Aturan teknis untuk untuk melaksanakan *Decentralisatie Wet 1903* keluarlah *Decentralisatie Besluit 1905* yang mengemukakan pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang dewan (*raad*) dalam pengelolaan keuangan yang dipisahkan dari pemerintah pusat. Dengan dasar UU itu maka kota-kota besar di Indonesia diubah statusnya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri yang terpisah dengan pemerintah pusat tetapi tetap bertanggungjawab kepada pemerintah pusat (Gubernur Jenderal). Kota otonom tersebut diberi nama *Gemeente*.⁴⁹ Pada tahun 1905, Makassar menjadi bagian dari 32 kota di Hindia Belanda yang mendapat status sebagai *Gemeente*. Berdasarkan *Staatblad* (Lembaran Negara) atau *Staatsblad an Netherlandsch-Indie* 1906 Nomor 17 tanggal 12 Maret 1906 dan disahkan pada 1 April 1906 menjadi daerah otonom sebagai *Gemeente van Makassar*. Namun yang memimpin *Gemeente* Makassar bukanlah walikota (*burgemeester*) melainkan tetap dijabat oleh *Assistant Residen*. Pengangkatan Walikota di Makassar baru dilakukan pada tahun 1918.

Sejak awal abad ke-20, Kota Makassar telah disiapkan menjadi suatu kota dengan fasilitas yang memadai, nyaman dan aman. Posisinya yang strategis, tepat

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto. "Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia Tahun 1900-1940". (Malang: Bayumedia. 2005), hlm. 13.

⁴⁹Purnawan Basundoro. "Sejarah Pemerintah Kota Surabaya". (Yogyakarta: Elmatra Publishing. 2012), hlm. 6-8.

berada di tengah wilayah Hindia Belanda, memungkinkan orang dari berbagai penjuru bisa datang⁵⁰. Pada awal abad ke-20 pembangunan dan perbaikan fasilitas di Kota Makassar mulai dilakukan dan semakin terasa setelah memiliki *Burgemeester* (Walikota) di tahun 1918.

2.3 Johan Everwijn Dambrink

Tahun 1918 Makassar memiliki *Burgemeester* pertamanya, Johan Everwijn Dambrink, sekaligus sebagai ketua Dewan Kota (*Gementeraad*). Ia bersaing dengan Mr. Schadee yang merupakan pensiunan Asisten Residen.⁵¹ Terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1918, Dambrink mulai menjabat.⁵²



Gambar 2.3 Johan Everwijn Dambrink (1918-1927)⁵³

⁵⁰Ilham Daeng Makkelo. Makalah Seminar Nasional Sejarah. 2017. “Merayakan Teknologi: Infrastruktur Dan Tata Kota Makassar, 1900-1942”, hlm.3.

⁵¹ *De Sumatra Post*, 21 Agustus 1918.

⁵² *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsh- Indie*, 6 Agustus 1918.

⁵³ Sumber: <https://nurkasim49.blogspot.co.id/2011/12/iii.html>

J. E. Dambrink adalah seorang Inspektur Pajak Impor dan Bea Cukai.⁵⁴ Dambrink memulai karirnya pada tahun 1896 sebagai karyawan bulanan pada *Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid* (Departemen Pengajaran, Ibadah, dan Industri), dimana kemudian ia naik pangkat menjadi *Hoofdcommies* (Kepala Komite). Pada tahun 1903, cuti sakit dan kembali tahun 1904, kemudian bergabung dengan *Algemeene Secretarie* (Sekretariat Negara) sebagai *Referendaris bracht* (Sekretaris Hukum).⁵⁵ Selanjutnya, pada 1910 dipindahkan ke Pelayanan Bea Masuk/ Bea Keluar dan Cukai (*Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen*), kemudian pada 28 Januari 1911 diangkat sebagai *inspecteur* (Inspektur). Tahun 1913 (cuti untuk kedua kalinya), tepat pada 1 Mei 1913 ia menjadi *Tijdelijk Hoofdinspecteur* (Kepala Inspektur sementara) dari pelayanan I dan A pada Departemen Keuangan, Pelayanan Pajak atas Bea Masuk/ Bea Keluar dan Cukai. Kemudian tahun 1918 ia ditunjuk sebagai Walikota Makassar.⁵⁶

Dalam menjalankan pemerintahan awal sebagai Walikota Makassar yang pertama, kantor J. E. Dambrink terletak di salah satu bangunan yang masih bersifat sementara dengan bangunan semi permanen, yang terletak di depan *Fort Rotterdam*. Mengenai rencana pembangunan Makassar di masa awal pemerintahannya, setahun sebelum menjabat tepatnya tahun 1917, Dambrink telah merencanakan pembangunan sebuah pasar baru yang lebih permanen di bagian

⁵⁴ *Het Vaderland*, 12 Agustus 1918.

⁵⁵ *Bataviasch Nieuwsblad*, 3 Januari 1930.

⁵⁶ *De Locomotif*, 4 Januari 1930.

utara *Fort Rotterdam*, tepatnya di Kampung Butung yang kemudian hari akan disebut Pasar Butung. Sebelah Selatan *Fort Rotterdam*, ada sebuah pasar yang terletak di Kampung Baru/Kampung Beru yang masih bersifat darurat yang mana digunakan sebagai tempat penyembelihan hewan. Selanjutnya pada tahun 1918 dibangun sebuah Gedung sebagai pelengkap dari pemerintahan lokal yang baru dibentuk oleh Hindia Belanda, yaitu Gedung Balai Kota (*Gemeentehuis*) yang terletak di *Gouverneurslaan* (sekarang disebut jalan Balai Kota) dan merupakan bangunan pemerintahan kolonial pertama yang terletak di luar kompleks *Fort Rotterdam*.⁵⁷ Bangunan ini kemudian digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan *Gemeenteraad* dibawah pemerintahan *Burgemester* pertama, Johan Everwijn Dambrink.

Dambrink pernah cuti karna sakit dari tanggal 26 April sampai dengan 28 Mei 1920 di Malang.⁵⁸ Kemudian kembali cuti pada bulan April 1922 dan akan kembali sekitar 1 Agustus⁵⁹, yang digantikan sementara oleh Mr. Raigers⁶⁰. Dambrink disebut-sebut akan menjadi walikota di Surabaya⁶¹. Pada tahun 1924 J. E Dambrink membuat peraturan pasar (*Passer Vedrponding*) yang terdiri dari 47 pasal membahas mengenai uang retribusi.

⁵⁷ Syahrudin Mansyur. "Konstruksi Baru Pameran Museum Kota Makassar". (Tesis: Universitas Indonesia. 2010), hlm. 113.

⁵⁸ *De Telegraaf*, 4 Juni 1920.

⁵⁹ *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch- Indie*, 29 April 1922.

⁶⁰ *Bataviaasch Nieuwsblad*, 25 Juli 1922.

⁶¹ *Deli Courant*, 13 Maret 1920.

Ketika pembangunan Pasar Butung telah rampung, selanjutnya pada tahun 1921-1922 dilakukan pembangunan *Halte Passer Boetoeng/ Stasiun Passarboetoeng/ Tramstation te Passarboetoeng* atau Stasiun Kereta Api Pasar Butung dan jalur kereta api yang menghubungkan antara Pasar Butung (Makassar) hingga Takalar (Kota Takalar lama). Stasiun beserta jalur kereta api sepanjang 47 km ini dibangun oleh *Staatstramwegen op Celebes* (STC) sebagai wakil urusan perkeretaapian di Sulawesi, khususnya Makassar. Peresmian pengoperasian dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1922 dengan dihadiri langsung oleh sejumlah bangsawan setempat dan pejabat pemerintah Kolonial Hindia Belanda, termasuk Walikota Makassar J. E. Dambrink serta Gubernur Sulawesi A. J. L. Couvreur (1915-1927).⁶²

Kemudian di tahun 1927 mengenai pembangunan perumahan rakyat di Makassar dalam *Javasche Courant* tanggal 25 November 1927 No. 94 yang terdapat ketentuan umum yang disahkan oleh Gubernur Celebes yang bertugas untuk mengadakan rumah sewa bagi masyarakat dan Mr. Dambrink selaku Walikota menyetujui pembangunan tersebut.⁶³ Pembangunan ini menjadi awal berkembangnya perumahan rakyat di Makassar.

⁶² Ningrum Pangestu. "Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan Monumen Di Kota Makassar (1930-1945)". (Skripsi: Universitas Hasanuddin. 2015), hlm. 62.

⁶³Inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988 Volume I. "Mengenai Volkhuysvesting Makassar. Lampiran *Javasche Courant*". (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). No. Reg. 9, hlm. 5.

Pada 14 Oktober 1928, Dambrink diangkat menjadi walikota sementara Batavia⁶⁴ yang mana ia menggantikan Mr. Meyroos pada saat cuti ke Eropa (penggantian yang agak tidak biasa ini mungkin terkait dengan kematian wakil walikota Batavia, Mr. A. van Nieuwenhoven Helbach)⁶⁵. Sebelum keberangkatannya ke Batavia, dilakukan pesta perpisahan dengan Walikota Dambrink pada tanggal 17 Oktober 1927. Wakil walikota Makassar, Mr. Eskes, mewakili Dewan Kota mengucapkan terimakasih untuk kerjasama yang telah dilakukannya. Mr. Dambrink telah dianggap menepati janji dan mengabdikan diri sepenuh hati untuk kepentingan yang telah dipercayakan kepadanya, bekerja tanpa lelah dan bersungguh-sungguh untuk kesejahteraan seluruh warga, juga telah melakukan banyak pekerjaan di Makassar dan kotamadaya bersyukur serta akan menyimpan kenangan atas masa jabatan walikota pertama mereka.⁶⁶ Pukul 08.30 prosesi obor berlangsung dan serenade dibawa oleh penduduk diiringi dengan musik, mereka pergi ke balai kota tempat walikota berbaris. Ia hendak diberikan *souvenir* oleh kaum *bourjuis* tapi belum siap karna keberangkatannya yang tergesa-gesa⁶⁷. Setelahnya ditunjuklah walikota Makassar yang baru yaitu Mr. de Groot yang merupakan direktur OSVIA⁶⁸.

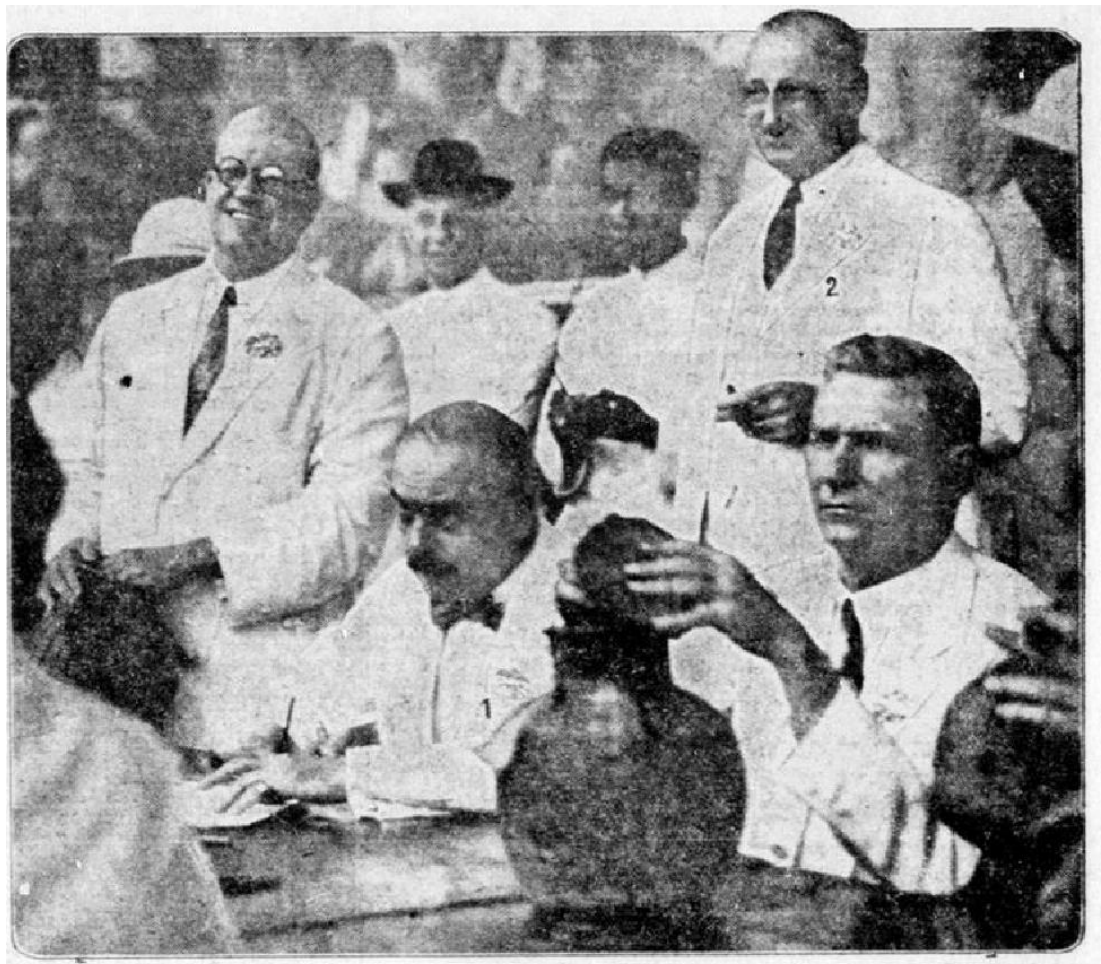
⁶⁴ *De Telegraf*, 14 Oktober 1927.

⁶⁵ *Algemeen Handelsblad*, 21 September 1927.

⁶⁶ *De Locomotif*, 24 Oktober 1927.

⁶⁷ *Algemeen Handelsblad*, 13 November 1927.

⁶⁸ *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 23 Oktober 1927.



Gambar 2.4 J. E. Dambrik Walikota Batavia (1) dan Mr. Trip Direktur *Javasche Bank* (2)⁶⁹

Ia akan dipulangkan ke tanah asalnya (Belanda) pada tahun 1928.⁷⁰ Dambrik adalah salah satu walikota yang bekerja dengan sukses di Makassar. Dia memiliki keuntungan selama masa pemerintahannya dan juga pada saat itu kota

⁶⁹ *De Telegraaf*, 12 Mei 1928.

⁷⁰ *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 20 April 1927.

yang dipimpinnya mendapatkan status Pelabuhan modern, dan juga ia bekerja dengan baik dalam pembangunan kereta api di *South West Celebes*.⁷¹

Mr. Dambrink menjadi pejabat sementara Walikota Batavia hingga pertengahan tahun 1928, kemudian Juli 1928, Mr. Meyroos kembali. Selanjutnya Mr. Dambrink memutuskan untuk pensiun ke Belanda. Ia wafat pada tahun 1930⁷².

⁷¹ *Algemeen Handelsblad*, 14 Oktober 1927.

⁷² *Soerabaijasch Handelsblaad*, 3 Januari 1930.